

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Beberapa temuan penting dapat disimpulkan dari analisis data dan pengujian hipotesis:

1. Hipotesis 1 (H1): Digitalisasi memengaruhi Transparansi Laporan Keuangan. Hasil uji *regression robust* menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap transparansi laporan keuangan ( $B = 0,465$ ;  $\text{Sig.} = 0,000$ ;  $R^2 = 0,229$ ). Hasil ini menunjukkan bahwa penerapan teknologi digital seperti kecerdasan awan dan analisis data besar dapat meningkatkan transparansi informasi perusahaan publik. Ini mendorong teori tata kelola di akademis, yang menekankan transparansi sebagai elemen penting dalam manajemen perusahaan yang baik. H1 diterima karena itu.
2. Hipotesis 2 (H2): Pengaruh Digitalisasi terhadap Akuntabilitas: Hasil analisis regresi yang kuat menunjukkan bahwa digitalisasi memiliki efek positif dan signifikan terhadap akuntabilitas ( $B = 0,963$ ;  $\text{Sig.} = 0,000$ ;  $R^2 = 0,123$ ). Meningkatnya digitalisasi telah menunjukkan bahwa opini auditor eksternal lebih baik dan kepatuhan terhadap standar akuntansi (PSAK) meningkat. Hasil penelitian akademis menunjukkan bahwa digitalisasi meningkatkan tanggung jawab perusahaan kepada pemangku kepentingan. H2 diterima sebagai hasilnya.
3. Hipotesis 3 (H3): Digitalisasi memengaruhi Tata Kelola Perusahaan. Hasil uji *regression* yang kuat menunjukkan bahwa digitalisasi memengaruhi manajemen perusahaan secara positif dan signifikan ( $B = 0,386$ ;  $\text{Sig.} = 0,000$ ;  $R^2 = 0,229$ ). Digitalisasi telah terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta meningkatkan kualitas tata kelola secara keseluruhan. Hasil

penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya di bidang akademis yang menekankan bahwa digitalisasi merupakan komponen penting dalam memperkuat prinsip-prinsip manajemen perusahaan yang baik. H3 diterima karena itu.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Meskipun penelitian ini memberikan temuan yang signifikan, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu dicatat:

1. Variabel penelitian memiliki batasan. Komputasi awan, big data, blockchain, dan pelaporan otomatis adalah satu-satunya penanda digitalisasi yang digunakan dalam penelitian ini. Elemen-elemen lain seperti *Robotic Process Automation*, *Internet of Things*, atau *Artificial Intelligence* tidak termasuk dalam penelitian ini.
2. Sampel penelitian memiliki beberapa keterbatasan. Temuan mungkin tidak berlaku untuk industri atau perusahaan swasta lain karena penelitian ini hanya mencakup 50 perusahaan publik di Indonesia.
3. Kekurangan pendekatan analitis. Baik regresi linier tunggal maupun berganda dilakukan dalam penelitian ini. Analisis yang lebih menyeluruh mungkin dapat diberikan oleh pendekatan lain seperti *Partial Least Squares* (PLS) atau *Structural Equation Modelling* (SEM).
4. Keterbatasan sumber daya, termasuk keterbatasan waktu dan data sekunder. Karena data hanya tersedia untuk periode waktu tertentu, data tersebut tidak dapat memberikan gambaran longitudinal tentang proses yang terjadi dalam evolusi digitalisasi dan pemerintahan.

### 5.3 Saran

Beberapa saran dapat diajukan berdasarkan penelitian yang menunjukkan bagaimana digitalisasi pelaporan keuangan memengaruhi akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola perusahaan. Sebagai pendekatan tata kelola yang bertujuan untuk meningkatkan integritas dan transparansi informasi, digitalisasi harus dilihat oleh perusahaan publik di Indonesia sebagai lebih dari sekadar terobosan teknologi. Disarankan agar perusahaan menciptakan sistem pelaporan digital yang ramah pengguna, aman, dan cepat tanggap. Investor dan masyarakat umum akan lebih percaya pada keandalan perusahaan, dan proses pelaporan akan berjalan lebih lancar.

Untuk otoritas seperti Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), hasil penelitian ini memberikan dasar empiris untuk mendorong percepatan adopsi digitalisasi melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung keterbukaan informasi. Standarisasi format pelaporan digital yang seragam akan menciptakan ekosistem pelaporan yang lebih transparan, akuntabel, dan dapat dibandingkan lintas perusahaan. Selain itu, regulator dapat mempertimbangkan pemberian insentif bagi perusahaan yang berhasil mengimplementasikan digitalisasi secara optimal, sehingga tercipta dorongan sistematis bagi seluruh perusahaan publik untuk bertransformasi.

Bagi penelitian selanjutnya, keterbatasan yang ditemukan dalam penelitian ini membuka ruang untuk pengembangan metodologi yang lebih komprehensif. Peneliti disarankan untuk memperluas cakupan variabel dengan mempertimbangkan faktor-faktor lain yang dapat memengaruhi digitalisasi, seperti budaya organisasi, kapasitas teknologi, dan tekanan regulasi. Pendekatan longitudinal atau panel data dapat digunakan untuk mengamati dinamika digitalisasi dan tata kelola perusahaan dalam jangka waktu yang lebih panjang, sehingga diperoleh gambaran yang lebih mendalam mengenai proses transformasi digital. Selain itu, penggunaan metode statistik yang

lebih kompleks seperti *Structural Equation Modeling* (SEM) atau regresi robust dapat membantu mengatasi pelanggaran asumsi klasik secara lebih sistematis dan meningkatkan validitas hasil penelitian.

Integrasi antara pendekatan kuantitatif dan kualitatif juga sangat disarankan. Pendekatan kuantitatif mampu memberikan bukti empiris mengenai hubungan antar variabel, sementara pendekatan kualitatif dapat memperkaya pemahaman mengenai motivasi, hambatan, dan strategi perusahaan dalam menerapkan digitalisasi. Dengan demikian, penelitian mendatang dapat menghasilkan temuan yang lebih komprehensif dan relevan bagi praktik tata kelola perusahaan.

Dari perspektif sosial, digitalisasi pelaporan keuangan dapat menjadi sarana edukasi publik mengenai keterbukaan informasi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan dan regulator perlu mengembangkan program literasi digital yang membantu pemangku kepentingan memahami dan memanfaatkan informasi keuangan secara lebih efektif. Dengan adanya literasi digital yang memadai, masyarakat akan lebih mampu menilai kinerja perusahaan secara objektif, sehingga tercipta hubungan yang lebih sehat antara perusahaan dan pemangku kepentingan.

